



IDEA : Vol 1 No 1 Januari 2026

GOVPOL

Journal of Public Governance and Policy

(publisantara.id/index.php/govpol)

Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Bungo dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

Resna Lastari¹

¹ IAK Setih Setio Muara Bungo, e-mail: resnalestari742@gmail.com

Info Artikel

Masuk: Desember 2025

Diterima: Januari 2026

Terbit: Januari 2026

Keywords:

DPRD, legislative oversight, JAMKESDA, health policy, local government

Abstract

This study aims to analyze the oversight function of the Regional House of Representatives (DPRD) of Bungo Regency in the implementation of the Regional Health Insurance Program (JAMKESDA). JAMKESDA is a regional policy instrument designed to ensure access to health services for poor and underprivileged communities. However, its implementation still faces various challenges that affect program effectiveness and accountability. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving DPRD members, local government officials, and beneficiary communities. The findings indicate that the DPRD's oversight function has been carried out through working meetings, field visits, and discussions of program implementation reports, but it has not been fully effective. Limited coordination, low responsiveness to field findings, and the absence of

clear oversight performance indicators are the main factors constraining effective oversight. This study highlights the need to strengthen the DPRD's oversight role to improve governance quality and sustainability of the JAMKESDA program in Bungo Regency.

Kata kunci:

DPRD, fungsi pengawasan, JAMKESDA, kebijakan kesehatan, pemerintah daerah

Corresponding Author:

Resna Lastari, e-mail: resnalestari742@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Program JAMKESDA merupakan instrumen kebijakan daerah yang dirancang untuk menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan yang berimplikasi pada efektivitas dan akuntabilitas program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap anggota DPRD, aparatur pemerintah daerah, serta masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD telah dilaksanakan melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, dan pembahasan laporan pelaksanaan program, namun belum berjalan secara optimal. Keterbatasan koordinasi, rendahnya responsivitas terhadap temuan lapangan, serta minimnya indikator kinerja pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran pengawasan DPRD guna meningkatkan kualitas tata kelola dan keberlanjutan Program JAMKESDA di Kabupaten Bungo.

I. Pendahuluan

Desentralisasi pemerintahan di Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, termasuk di bidang kesehatan. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk mampu merancang dan melaksanakan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu kebijakan strategis di bidang kesehatan adalah Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), yang bertujuan menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Meskipun program JAMKESDA dirancang sebagai solusi atas keterbatasan akses kesehatan, implementasinya di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, serta keberlanjutan pendanaan program. Dalam konteks ini, fungsi pengawasan DPRD menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan instrumen checks and balances terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Menurut O'Donnell (1998), pengawasan legislatif merupakan bagian dari akuntabilitas horizontal yang berperan penting dalam mencegah penyimpangan kekuasaan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD di tingkat daerah sering kali belum berjalan optimal. Keterbatasan kapasitas kelembagaan, minimnya indikator kinerja pengawasan, serta lemahnya tindak lanjut atas hasil pengawasan menjadi kendala utama (Bovens, 2007; Schillemans, 2013). Kondisi ini juga tercermin dalam penyelenggaraan Program JAMKESDA di Kabupaten Bungo.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bungo dalam penyelenggaraan Program JAMKESDA. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi penguatan peran DPRD serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program kesehatan daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik pengawasan DPRD dalam konteks nyata penyelenggaraan Program JAMKESDA. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bungo, dengan fokus pada DPRD Kabupaten Bungo dan instansi pemerintah daerah yang terlibat dalam pelaksanaan Program JAMKESDA. Informan penelitian ditentukan secara purposive, meliputi anggota DPRD (khususnya Komisi terkait), pejabat Dinas Kesehatan, serta masyarakat penerima manfaat JAMKESDA.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan dan pengalaman informan terkait pelaksanaan pengawasan DPRD. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung aktivitas pengawasan, sedangkan dokumentasi meliputi penelaahan peraturan daerah, laporan pelaksanaan program, dan risalah rapat DPRD.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode

3. Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Bungo telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Program JAMKESDA melalui berbagai mekanisme formal, seperti rapat kerja dengan pemerintah daerah, pembahasan laporan pelaksanaan program, serta kunjungan lapangan ke fasilitas kesehatan. Namun demikian, efektivitas pengawasan tersebut masih belum optimal.

Dari aspek perencanaan pengawasan, DPRD belum memiliki indikator kinerja pengawasan yang jelas dan terukur. Pengawasan cenderung bersifat reaktif, dilakukan setelah muncul keluhan masyarakat, bukan secara preventif dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Schillemans (2013) yang menyatakan bahwa lemahnya kerangka evaluasi kinerja dapat mengurangi efektivitas akuntabilitas publik.

Pada aspek pelaksanaan, koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah belum berjalan secara optimal. Temuan lapangan menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pengawasan sering kali tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pihak eksekutif. Hal ini menunjukkan lemahnya daya ikat pengawasan DPRD dalam praktik pemerintahan daerah.

Selain itu, keterbatasan kapasitas anggota DPRD dalam memahami aspek teknis kebijakan kesehatan juga menjadi kendala. Mardiasmo (2018) menekankan bahwa kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengawasan sektor publik. Tanpa pemahaman yang memadai, pengawasan cenderung bersifat administratif dan tidak menyentuh substansi kebijakan.

Dari perspektif akuntabilitas publik, kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme checks and balances di tingkat daerah belum berjalan secara efektif. Bovens (2007) dan O'Donnell (1998) menegaskan bahwa pengawasan legislatif yang kuat merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bungo dalam penyelenggaraan Program JAMKESDA telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Keterbatasan indikator kinerja pengawasan, lemahnya koordinasi dengan eksekutif, serta rendahnya kapasitas teknis pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kapasitas anggota DPRD, penyusunan indikator kinerja pengawasan yang jelas, serta peningkatan mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi teori akuntabilitas publik dan pengawasan legislatif dalam konteks pemerintahan daerah.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Bungo atas dukungan dan keterbukaan dalam memberikan akses data serta informasi terkait pelaksanaan pengawasan Program JAMKESDA. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak eksekutif daerah, khususnya instansi terkait pelaksanaan program, serta para informan yang telah berkontribusi melalui wawancara dan berbagi pengalaman selama proses penelitian.

Ucapan terima kasih turut diberikan kepada institusi akademik, pembimbing, dan rekan sejawat atas bimbingan, masukan, serta dukungan yang konstruktif dalam penyusunan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan fungsi pengawasan legislatif yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- O'Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in new democracies. *Journal of Democracy*, 9(3), 112–126.
- Schillemans, T. (2013). The public accountability review: A meta-analysis of public accountability research. *Public Administration*, 91(4), 1–20.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.